

Hakikat Sosiologi Politik

Drs. Komarudin, M.Si.



PENDAHULUAN

Modul 1 ini adalah pintu gerbang untuk memasuki bangunan pengetahuan sosiologi politik. Sebagai pintu gerbang, Modul 1 ini sangat bermanfaat untuk membuka cakrawala Anda dalam memahami hakikat sosiologi politik. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam Modul 1 ini mencakup pengertian pokok sosiologi politik, perkembangan sosiologi politik, serta pendekatan dan peranan sosiologi politik. Peranan yang dimaksudkan dalam modul ini lebih ditekankan pada peranan terhadap pembangunan nasional, khususnya dalam pembangunan politik.

Sejalan dengan penyajian pokok-pokok materi tersebut maka kompetensi yang diharapkan dicapai oleh Anda setelah mempelajari modul ini adalah agar Anda mampu:

1. menjelaskan pengertian pokok sosiologi politik;
2. menguraikan perkembangan sosiologi politik;
3. menjelaskan pendekatan dan peranan sosiologi politik.

Kompetensi-kompetensi tersebut tentu sangat penting bagi Anda. *Pertama*, dengan kompetensi tersebut diharapkan Anda lebih mudah dalam mempelajari dan memahami modul-modul selanjutnya. *Kedua*, kompetensi tersebut diharapkan membantu Anda dalam melaksanakan tugas-tugas pembelajaran di sekolah kelak. Sebagai guru PKn Anda tentu dituntut untuk memiliki wawasan yang luas sesuai kebutuhan dan dengan menguasai modul ini Anda diharapkan menjadi terbantu.

Untuk mencapai kompetensi tersebut maka kegiatan pembelajaran dalam Modul 1 ini diorganisasikan dalam 3 kegiatan belajar sebagai berikut.

Kegiatan Belajar 1 : Pengertian Pokok Sosiologi Politik.

Kegiatan Belajar 2 : Perkembangan Sosiologi Politik.

Kegiatan Belajar 3 : Pendekatan dan Peranan Sosiologi Politik.

Agar Anda berhasil dengan baik dalam mempelajari modul ini maka ikutilah petunjuk belajar berikut.

1. Bacalah dengan cermat uraian materi bagian demi bagian hingga Anda memahami inti atau pokok-pokok materi modul ini melalui pemahaman Anda sendiri. Temukan kata-kata atau kalimat kunci mengenai konsep yang terdapat dalam setiap uraian materi sehingga Anda mudah memahami dan lama mengingatnya.
2. Apabila Anda menemukan kata-kata sulit atau kata-kata yang Anda anggap baru, cari, dan baca pengertiannya dalam daftar kata-kata sulit (*glosarium*) atau kamus.
3. Mantapkan pemahaman Anda dengan membaca sumber-sumber lain yang relevan, tidak hanya buku-buku yang terdaftar dalam daftar pustaka. Baca buku-buku lain atau artikel dalam jurnal dan internet atau sumber lain yang membahas tentang sosiologi politik.

KEGIATAN BELAJAR 1

Pengertian Pokok Sosiologi Politik

Kegiatan Belajar 1 ini membahas tentang pengertian pokok sosiologi politik. Pengertian pokok dalam Kegiatan Belajar 1 ini terutama menyajikan pendapat Maurice Duverger serta Michael Rush dan Phillip Althoff. Pemahaman terhadap substansi dalam Kegiatan Belajar 1 ini sangat bermanfaat bagi Anda untuk lebih memahami substansi dalam kegiatan belajar berikutnya. Jika Anda belum memahami substansi Kegiatan Belajar 1 ini maka bisa jadi akan menemui kendala dalam memahami fokus substansi kegiatan belajar berikutnya. Oleh karena itu, kuasailah substansi konsep dari Kegiatan Belajar 1 ini dan setelah menyelesaikan Kegiatan Belajar 1 ini diharapkan Anda mampu menjelaskan pengertian pokok sosiologi politik. Kemampuan Anda dalam memberikan penjelasan ini mengindikasikan bahwa Anda telah memahami betul pengertian sosiologi politik, cakupannya dan posisinya di antara dua disiplin, yaitu sosiologi dan ilmu politik.

Apa itu sosiologi politik? Sosiologi politik berasal dari dua kata, yang secara terpisah mempunyai arti sendiri-sendiri sebagai disiplin ilmu, yaitu sosiologi dan politik. Istilah sosiologi pertama kali dimunculkan oleh Auguste Comte (1798-1857), salah seorang pendiri disiplin ilmu ini, pada tahun 1839 di dalam bukunya *Cours de Philosophie Positive*, jilid IV (Duverger, 2005). Secara sederhana sosiologi berarti studi tentang masyarakat, tetapi dalam praktiknya sosiologi berarti studi tentang masyarakat dipandang dari satu segi tertentu. Comte dan juga Spencer (1820-1903) seorang pendiri lainnya (Rush & Althoff, 2005), menekankan masyarakat sebagai unit dasar dari analisis sosiologis, sedangkan bermacam-macam lembaga, seperti keluarga, dan lembaga-lembaga politik, ekonomi dan keagamaan dan interelasi antara lembaga-lembaga tersebut merupakan sub-unit dari analisis. Para sosiolog modern mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang membahas kelompok-kelompok sosial” (Johnson, 1961, dalam Rush, 2005) dan “studi mengenai interaksi-interaksi manusia dan interelasinya” (Ginsburg, 1934, dalam Rush 2005). Dari sudut pandang ini sosiologi memberikan pusat perhatian pada tingkah laku manusia. Tingkah laku yang dimaksud bukan tingkah laku individual dan tingkah laku kolektifnya secara terpisah dari masyarakat karena hal ini merupakan bidang kajian psikiatri dan psikologi, melainkan tingkah laku manusia, baik individu

maupun kolektif, dan relasinya dengan masyarakat. Dengan demikian, menurut pandangan sosiologi modern, sosiologi adalah studi mengenai tingkah laku manusia dalam konteks sosial.

Dari uraian di atas, dapat kita ikhtisarkan beberapa pengertian sosiologi sebagai berikut.

1. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat.
2. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat, dan
3. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, baik individu maupun kelompok dan relasinya dengan masyarakat, atau tingkah laku manusia dalam konteks sosial.

Setelah Anda memahami apa itu sosiologi selanjutnya Anda perlu memahami apa itu *politik*. Banyak batasan mengenai apa itu politik. Beragamnya batasan ini sangat tergantung dari sudut pandang para pembuat batasan itu masing-masing. Para pembuat batasan hanya menepi satu aspek atau unsur saja dari politik. Unsur itu diperlakukannya sebagai konsep pokok, yang dipakainya untuk menepi unsur-unsur lainnya. Hal ini tentu saja sangat menyulitkan kita untuk memahami apa itu politik. Namun demikian, untuk memberikan gambaran kepada Anda mengenai apa itu politik, berikut akan diuraikan konsep-konsep pokok yang mendasari perumusan batasan mengenai politik.

Miriam Budiardjo (2003) mengemukakan bahwa konsep-konsep pokok mengenai politik adalah **negara** (*state*), **kekuasaan** (*power*), **pengambilan keputusan** (*decision making*), **kebijakan** (*policies*) dan **pembagian** (*distribution*) atau **alokasi** (*allocation*). Secara terurai Miriam Budiardjo menjelaskan bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu yang di dalamnya terdapat proses pengambilan keputusan. Dalam melaksanakan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut perlu ditentukan kebijakan-kebijakan umum (*public policies*) yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau alokasi dari sumber-sumber yang ada. Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan itu perlu dimiliki kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*) yang akan dipakai baik, untuk membina kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang timbul dalam proses ini.

Penjelasan yang lebih kurang sama dikemukakan oleh Rush dan Althoff (2005) mengenai esensi dari politik. Menurutnya batasan mengenai politik bermacam-macam. Politik bisa diartikan sebagai proses penyelesaian dari konflik-konflik manusia atau proses dengan mana masyarakat membuat keputusan-keputusan ataupun mengembangkan kebijakan-kebijakan tertentu; atau secara otoritatif mengalokasikan sumber-sumber dan nilai tertentu; atau berupa pelaksanaan kekuasaan dan pengaruh di dalam masyarakat.

Namun demikian, menurut Rush dan Althoff meskipun politik itu memiliki batasan yang bermacam-macam, akan sangat membantu apabila menganggap kekuasaan sebagai titik sentral dari studi politik. Batasan ini juga disepakati oleh Duverger (2005), dan beberapa pakar lainnya. Dengan demikian, tampaknya kita menyepakati bahwa politik dibatasi sebagai masalah kekuasaan, dan tentunya kita pun sepakat pula membatasi ilmu sebagai ilmu politik sebagai ilmu tentang kekuasaan.

Dua pengertian, yaitu sosiologi dan politik atau ilmu politik telah Anda pahami dengan baik. Selanjutnya, Anda perlu memahami apa itu sosiologi politik, bagaimana konsepsi dasarnya. Apakah pengertiannya merupakan gabungan dari pengertian sosiologi dan pengertian politik atau memiliki pengertian tersendiri. Uraian berikut akan memberikan pemahaman kepada Anda.

1. Konsep Sosiologi Politik sebagai Ilmu Negara

Menurut Duverger (2005) konsep ini mempergunakan kata politik dalam konotasi yang berhubungan dengan negara. Kata negara di sini dimaksudkan untuk mengartikan kategori khusus dari kelompok-kelompok manusia atau masyarakat. Pertama negara bangsa (*nation-state*) dan kedua negara pemerintah (*government-state*). Negara bangsa menunjukkan masyarakat nasional, yaitu komunitas yang muncul pada akhir Zaman Pertengahan dan kini menjadi paling kuat terorganisir dan paling utuh berintegrasi. Negara Pemerintah menunjukkan pada penguasa dan pemimpin dan masyarakat nasional ini. Mendefinisikan sosiologi politik sebagai ilmu negara berarti menempatkannya dalam klasifikasi ilmu-ilmu sosial yang didasarkan pada hakikat dari masyarakat-masyarakat yang dipelajari. Sosiologi politik dalam pengertian ini berada dalam kategori yang berbeda dari sosiologi keluarga, sosiologi kota, sosiologi agama, sosiologi etnik atau kelompok-kelompok minoritas.

2. Konsep Sosiologi Politik sebagai Ilmu tentang Kekuasaan

Konsep yang diuraikan di atas merupakan konsep tua dari sosiologi politik, demikian Duverger (2005) mengatakan. Selanjutnya dia mengatakan, konsep yang lebih modern menganggap bahwa sosiologi politik adalah ilmu tentang kekuasaan, pemerintahan, otoritas, komando di dalam semua masyarakat manusia, bukan saja di dalam masyarakat nasional. Konsepsi ini berasal dari Leon Duguit ahli hukum Prancis, yang dinamakan perbedaan antara yang memerintah (*gouvernements*) dan yang diperintah (*gouvernes*) (Duverger, 2005). Dia percaya bahwa dalam setiap kelompok manusia dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari yang sifatnya sementara sampai yang stabil, ada orang yang memerintah dan mereka yang diperintah, mereka yang memberikan perintah dan mereka yang mentaatinya, mereka yang membuat keputusan dan mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Perbedaan ini merupakan fakta politik yang fundamental yang berada dalam setiap masyarakat dan pada setiap tingkatan sosial.

Pandangan ini menempatkan sosiologi politik di dalam klasifikasi yang lain dari pengertian yang pertama, yaitu yang didasarkan bukan pada hakikat masyarakat yang dipelajari, tetapi pada jenis fenomena tertentu yang senantiasa muncul kembali pada setiap masyarakat. Dengan demikian, sosiologi politik dalam pengertian ini berbeda dengan sosiologi ekonomi, sosiologi agama. Dari sudut pandang ini sosiologi politik diartikan sebagai ilmu tentang kekuasaan dalam masyarakat.

Pertanyaannya kemudian adalah kekuasaan dalam masyarakat yang bagaimanakah yang menjadi cakupan sosiologi politik? Apa dalam setiap lapisan masyarakat atau dalam lingkup masyarakat tertentu. Menjawab pertanyaan ini Duverger (2005) memberikan dua penjelasan. Penjelasan pertama dilihat dari ukuran dan kompleksitas kelompok-kelompok sosial dan kedua dilihat dari hakikat ikatan-ikatan organisatorisnya.

Menurut Duverger (2005) dilihat dari ukuran (*size*) dan kompleksitasnya ada dua kelompok masyarakat, yaitu kelompok elementer atau kelompok kecil dan kelompok kompleks. Kekuasaan dalam kelompok yang lebih besar inilah yang ada sangkut pautnya dengan sosiologi politik, sedangkan pada kelompok-kelompok yang kecil menjadi wilayah kajian psikologi sosial. Namun, perbedaan ini dianggap kurang akurat karena teramat sulit membedakan antara kelompok-kelompok elementer dengan kelompok-kelompok kompleks. Pada kelompok-kelompok elementer pun terdapat kompleksitas tersendiri. Sebaliknya, dalam kelompok sekecil apa pun

menunjukkan adanya proses diferensiasi yang menghasilkan klik, koalisi-koalisi, dan groups yang melibatkan peranan atau menggunakan kekuasaan. Berdasarkan ukuran (*size*) ini maka kajian sosiologi politik mencakup “makropolitik” yang berada dalam komunitas-komunitas yang besar dan “mikropolitik” yang berada pada kelompok-kelompok kecil.

Sementara itu, dilihat dari ikatan-ikatan organisatorisnya, masyarakat dapat dibedakan dalam masyarakat “swasta” dan masyarakat “universal”. Masyarakat swasta adalah kelompok-kelompok dengan kepentingan-kepentingan khusus dan rasa solidaritas terbatas yang masing-masing kelompok sesuai dengan kategori tertentu dari aktivitas manusia. Termasuk dalam kategori masyarakat ini, misalnya serikat buruh, organisasi olahraga, organisasi kesenian, perusahaan komersial, organisasi-organisasi profesi dan organisasi-organisasi sosial lainnya.

Masyarakat universal adalah masyarakat yang meliputi dan melebihi semua masyarakat-masyarakat swasta ini. Masyarakat universal adalah masyarakat yang memiliki kategori umum tertentu, tidak hanya didasarkan kegiatan atau aktivitas tertentu saja. Rasa solidaritas lebih besar, lebih dalam dan lebih mesra daripada masyarakat-masyarakat swasta.

Bagi sebagian penulis, kekuasaan dalam masyarakat universal merupakan objek analisis sosiologi politik bukan kekuasaan di dalam masyarakat swasta. Alasan bagi golongan ini adalah bahwa di dalam masyarakat swasta otoritas atau kekuasaan dianggap hanya memiliki hakikat teknis tidak mempersoalkan masalah ketergantungan individu-individu dalam hubungan dengan yang lain, suatu hal yang justru merupakan dasar dari kekuasaan.

Secara sekilas pembedaan ini tampak sesuai dengan arti populer dari “politik”. Misalnya, apabila kita membicarakan pemimpin-pemimpin politik dan pemerintah berarti membicarakan otoritas dalam masyarakat universal. Namun, apabila dikaji secara mendalam perbedaan antara masyarakat universal dan masyarakat swasta tidak bisa menjadi dasar bagi definisi sosiologi politik. *Pertama*, pembedaan tersebut samar-samar sifatnya. Misalnya, apakah keluarga merupakan masyarakat universal atau masyarakat swasta. Demikian juga apakah masyarakat agama merupakan masyarakat universal atau masyarakat swasta. Bagi kepala keluarga, keluarga dipandang sebagai masyarakat universal. Begitu juga bagi pemimpin agama masyarakat agama adalah masyarakat universal, namun, bagi yang lain belum tentu dipandang demikian. *Kedua*, ada dua paham mengenai masyarakat universal.

Paham pertama didefinisikan oleh perasaan memiliki (*sense of belonging*), rasa kekariban (*sense of fellowship*) yang mempengaruhi totalitas kegiatan manusia. Paham kedua adalah konsep lebih bersifat formal dan yuridis, yakni menganggap masyarakat universal pada masa kini sebagai *nation state* (negara bangsa). Sementara pada zaman lain, bisa kota, suku dan lainnya. Jika paham kedua yang dipakai maka akibatnya akan terjebak pada teori yang menyamakan sosiologi politik dengan negara.

Masyarakat mana yang menjadi kajian sosiologi politik. Apakah masyarakat universal? Menurut Duverger (2005) hal tersebut sulit diterima jika sosiologi politik didefinisikan sebagai “ilmu tentang kekuasaan di dalam masyarakat universal” tidak lebih baik daripada didefinisikan sebagai “ilmu tentang kekuasaan di dalam negara”. Sering kali kedua ungkapan tersebut dianggap sinonim oleh yang mempergunakannya.

Agar dapat keluar dari kesulitan itu, Duverger (2005) menyarankan lebih baik melihatnya dari segi “hubungan-hubungan otoritas” (*authority relationships*) yang berjenis-jenis di dalam semua masyarakat, baik itu kecil atau besar sederhana atau kompleks swasta atau universal. Hubungan otoritas yang dimaksudkan adalah setiap hubungan yang tidak sama di mana seseorang atau beberapa individu menguasai yang lain dan mengarahkannya menurut kehendaknya sendiri. Pada umumnya hubungan manusia memang demikian. Dalam kenyataan sangat sedikit yang benar-benar egalitarian (sama sederajat).

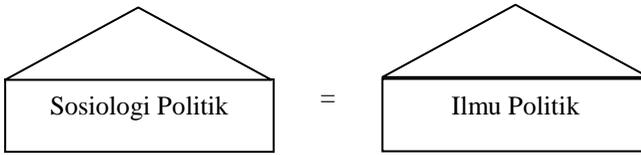
Persoalannya sekarang adalah hubungan otoritas yang bagaimana yang melibatkan “kekuasaan” dalam arti yang tepat. Untuk menjelaskan masalah ini. Duverger membedakan hubungan-hubungan yang bersifat luas, yakni hubungan yang bersifat “institusional” dan hubungan dalam arti sempit yang bersifat “personal”. Kekuasaan dari sudut pandang ini adalah terdiri atas seluruh kerangka **institusi sosial** yang berhubungan dengan **otoritas** yang berarti adanya **dominasi** beberapa orang terhadap yang lainnya. Ia bukan hubungan-hubungan sederhana yang tidak sama yang tidak memiliki sifat institusional dan tidak berasal dari institusi. Ada dua kriteria untuk membedakan institusi dengan hubungan yang bersifat sempit, pertama yang bersifat fisik dan kedua sikap kolektif dan keyakinan. Secara fisik hubungan yang bersifat sempit adalah hubungan manusia yang tidak terikat kepada model-model yang sudah ada terdahulu biasanya berlangsung tidak *permanen*, *sporadis*, sekejap, dan tidak stabil. Sedangkan institusi adalah model hubungan yang berlaku sebagai pola hubungan yang konkret bersifat

stabil, berlangsung lama dan kohesif. Model-model institusional relatif sama dengan pengertian “struktur” dalam sosiologi modern. Struktur adalah sistem hubungan-hubungan yang tidak akan terlepas dari hubungan itu sendiri dan keasliannya ditentukan oleh hubungannya dengan model struktural. Dalam arti ini maka parlemen, menteri-menteri kabinet, kepala-kepala negara dan pemilihan umum adalah institusi.

Atas dasar keyakinan manusia, kekuasaan dirasakan sebagai kekuasaan oleh mereka yang mentaatinya dan mereka yang menggunakannya. Bagi mereka, hal tersebut bukan hanya fenomena fisik sebuah dominasi, melainkan juga fenomena psikologis. Dalam hal ini masalah “legitimasi” (keabsahan atau penerimaan masyarakat) menjadi penting. Kekuasaan selalu dianggap sebagai sesuatu yang “legitimate” (sah untuk diterima) sampai tingkat tertentu. Oleh karena kita menerima kekuasaan tersebut maka sangatlah wajar bila kita mentaatinya. Kekuasaan ditaati karena kita pikir kita harus berbuat demikian karena kita percaya bahwa kekuasaannya “sah” adanya untuk ditaati. Selama ada kekohesivan stabilitas fisik, dan adanya panutan terhadap suatu model struktural, keabsahan ini yang membedakan kekuasaan dari sekadar hubungan otoritas.

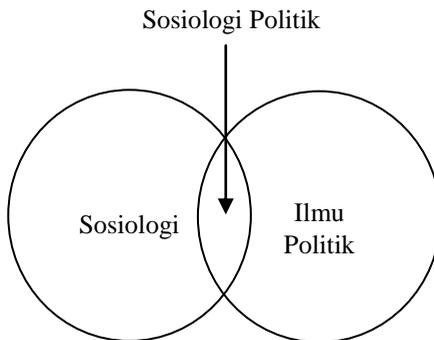
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sosiologi politik adalah *ilmu tentang hubungan kekuasaan yang legitimate dalam institusi sosial*. Dalam konteks ini sosiologi politik tidak mengkaji hubungan-hubungan kekuasaan yang bersifat personal.

Mendasarkan pada pengertian ini maka seakan-akan Duverger mempersamakan sosiologi politik dengan ilmu politik, hampir tidak ada bedanya. Hal ini didasarkan pemahaman bahwa sosiologi adalah sama dengan ilmu-ilmu sosial. Jika ilmu politik adalah salah satu bidang dari ilmu-ilmu sosial maka sosiologi politik dianggap sebagai salah satu cabang dari sosiologi. Oleh karena itu, menurut Duverger, yang juga mendapat pengakuan di Perancis sosiologi politik sama dengan ilmu politik, yakni sama-sama mengkaji kekuasaan dalam masyarakat sebagai objek studi. Persepsi Duverger yang mempersamakan sosiologi politik dengan ilmu politik ditegaskan oleh Alfian (2005) dalam kata pengantar buku terjemahan Bahasa Indonesia. Menurut Alfian, Duverger tidak mempermasalahkan perbedaan antara ilmu politik dengan sosiologi politik, bahkan boleh dikatakan bagi Duverger kedua hal tersebut dianggap sama saja. Dengan demikian, apabila diilustrasikan maka bangunan pengetahuan sosiologi politik menurut Duverger tampak seperti Gambar 1.1.



Gambar 1.1.
Ilustrasi Pengertian Sosiologi Politik menurut Duverger

Pemikiran Duverger yang sangat sosiologis tersebut, tentu ditolak oleh para ahli ilmu politik. Rush dan Althoff (2005) misalnya, keduanya tidak sependapat dengan pemikiran bahwa sosiologi politik adalah cabang dari sosiologi dan dianggap sama dengan ilmu politik. Keduanya hanya mengakui bahwa ada studi-studi politik yang dilakukan oleh para sosiolog, seperti Marx Weber, Mosca, dan Pareto dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Menurut Rush dan Althoff sosiologi politik merupakan bidang subjek yang mempelajari mata rantai antara politik dan masyarakat, antara struktur-struktur sosial dan struktur-struktur politik, dan antara tingkah laku sosial dan tingkah laku politik. Sosiologi politik merupakan jembatan teoretis dan jembatan metodologis antara sosiologi dan ilmu politik, atau yang oleh Sartori disebut *hybrid inter-disipliner* atau hasil perkawinan antardisiplin, yakni antara sosiologi dan ilmu politik. Dengan demikian, sosiologi politik dipandang sebagai *kajian yang memuat aspek-aspek sosiologi dan aspek-aspek politik secara integratif*. Secara ilustratif pendapat Rush dan Althoff terlihat dalam Gambar 1.2.



Gambar 1.2.
Ilustrasi Pengertian Sosiologi Politik menurut
Michael Rush dan Phillip Althoff

Manakah di antara kedua pendapat di atas yang Anda setuju? Coba renungkan atau Anda diskusikan dengan teman-teman Anda, agar Anda lebih memahami pengertian sosiologi politik secara lebih mantap.

Untuk kepentingan pembelajaran pada program studi PKn maka pandangan yang menyatakan bahwa sosiologi politik merupakan kajian yang memuat aspek-aspek sosiologi dan aspek-aspek politik secara integratif tampaknya lebih cocok menjadi acuan dalam mata kuliah ini. Artinya, sosiologi politik dalam mata kuliah ini dipandang sebagai satu bidang kajian yang menyajikan konsep-konsep integratif sosiologis-politis dalam menganalisis gejala-gejala politik. Atau, bisa dikatakan, sosiologi politik adalah bidang kajian yang menganalisis fenomena politik (kekuasaan) secara sosiologis.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Apa yang dimaksud dengan sosiologi?
- 2) Coba jelaskan mengapa konsep pokok dari politik adalah kekuasaan?
- 3) Apa kesimpulan Anda tentang hakikat sosiologi politik?
- 4) Apa perbedaan pemikiran Duverger dengan Rush dan Althoff mengenai sosiologi politik?
- 5) Mengapa sosiologi politik dipandang sebagai *hybrid inter-disipliner*?

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Pengertian mengenai sosiologi dapat dilihat dari berbagai definisi tentang sosiologi, baik definisi klasik seperti yang diungkapkan oleh Auguste Comte dan juga definisi modern oleh para penerusnya. Melalui pengkajian bermacam-macam definisi tersebut Anda akan memahami apa itu sosiologi.
- 2) Politik sebagai ilmu memiliki banyak konsep, namun ada satu konsep inti sebagai objek studi politik yang disetujui oleh berbagai pakar politik maupun sosiologi politik. Konsep inti tersebut ada pada setiap kelompok manusia yang disebut masyarakat.

- 3) Sosiologi dapat dilihat dari dua segi, pertama dilihat dari substansi materi yang dipelajari dan kedua dilihat dari posisi sosiologi politik sebagai suatu bidang studi antara sosiologi dan politik.
- 4) Untuk dapat melihat perbedaan pemikiran antara Duverger dengan Rush dan Althoff maka Anda harus melihat keahlian masing-masing. Lebih jauh Anda perlu mencermati konsepsi tokoh-tokoh tersebut sehingga mengetahui posisi sosiologi politik di antara sosiologi dan politik.
- 5) Hibrid artinya perkawinan atau hasil perkawinan, interdisipliner artinya antardisiplin ilmu.



RANGKUMAN

Istilah sosiologi politik berasal dari dua kata, yaitu sosiologi dan politik. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat, kelompok-kelompok sosial, dan tingkah laku individu baik individual maupun kolektif dalam konteks sosial. Politik atau ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kekuasaan sebagai konsep inti. Konsep-konsep lain sebagai objek studi politik adalah negara, pengambilan keputusan, kebijakan, distribusi dan alokasi.

Oleh para ahli sosiologi, sosiologi politik didefinisikan sebagai cabang atau spesialisasi dari sosiologi. Duverger bahkan menganggap sosiologi politik sama dengan ilmu politik. Para ahli ilmu politik memandang sosiologi politik sebagai bidang subjek (*subject area*) studi yang mempelajari politik (kekuasaan) dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Dalam mata kuliah ini, sosiologi politik dipandang sebagai bidang kajian yang bersifat interdisipliner, yang mempelajari konsep-konsep sosiologi, politik, dan fenomena politik secara sosiologis.



TES FORMATIF 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Orang yang pertama kali berjasa menemukan istilah sosiologi dan mengembangkan sosiologi ilmiah ialah
 - A. Herbert Spencer
 - B. August Comte
 - C. Montesquieu
 - D. Marx Weber

- 2) Sosiologi ilmiah mengalami perkembangan hingga saat ini, yang menjadi titik pandang sosiologi modern adalah
 - A. masyarakat pada umumnya
 - B. masyarakat pada khususnya
 - C. kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat
 - D. tingkah laku individual dan kolektif dalam konteks sosial

- 3) Banyak batasan mengenai politik. Perbedaan tersebut didasarkan atas sudut pandang yang berbeda-beda mengenai politik. Namun, apabila ditelusuri batasan-batasan itu didasarkan atas konsep-konsep tertentu yang menjadi fokus. Konsep-konsep yang dimaksud, *kecuali*
 - A. rakyat
 - B. kekuasaan
 - C. pengambilan keputusan
 - D. distribusi dan alokasi sumber

- 4) Dalam proses politik, setiap pengambilan keputusan menghasilkan kebijakan-kebijakan dan untuk melaksanakannya diperlukan
 - A. aparat yang bersih dan berwibawa
 - B. sumber dana yang memadai
 - C. kekuasaan dan kewenangan
 - D. rakyat yang taat dan patuh

- 5) Menurut Duverger dalam perkembangannya sosiologi politik memiliki dua konsepsi atau pengertian, yaitu sebagai ilmu
 - A. negara dan pemerintahan
 - B. kekuasaan dan pemerintahan
 - C. kekuasaan dan masyarakat
 - D. negara dan kekuasaan

- 6) Leon Duguit meyakini bahwa dalam setiap lapisan masyarakat memiliki perbedaan. Dalam konteks kekuasaan perbedaan yang dimaksud adalah antara
 - A. pemerintah dan rakyat
 - B. atasan dan bawahan
 - C. mereka yang memerintah dan yang diperintah
 - D. mereka yang mentaati perintah dan yang melanggar perintah

- 7) Kekuasaan dalam masyarakat dilihat berdasarkan *size* (ukuran) dapat dibedakan atas dua macam, yakni
 - A. politik global dan politik lokal
 - B. internal politik dan eksternal politik

- C. makropolitik dan mikropolitik
 D. politik negara dan politik masyarakat
- 8) Secara sederhana sosiologi politik diartikan sebagai ilmu tentang
 A. kekuasaan dalam orang-per orang
 B. kekuasaan dalam masyarakat
 C. kekuasaan dalam pemerintah
 D. kekuasaan dalam negara
- 9) Dalam pandangan Duverger sosiologi politik bukan mempelajari hakikat dari masyarakat akan tetapi fenomena yang ada dalam masyarakat itu, yaitu fenomena kekuasaan. Oleh karena itu, sosiologi politik dianggap sejajar dengan, *kecuali*
 A. sosiologi ekonomi
 B. sosiologi agama
 C. sosiologi hukum
 D. sosiologi ilmiah
- 10) Berbeda dengan pandangan Duverger yang memandang sosiologi politik sebagai cabang dari sosiologi dan karenanya dianggap sama dengan ilmu politik, Michael Rush dan Phillip Althoff memandang sosiologi politik sebagai
 A. bidang subjek yang bersifat interdisipliner
 B. bidang studi yang bersifat multidisipliner
 C. disiplin ilmu tersendiri
 D. gabungan disiplin ilmu

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2

Perkembangan Sosiologi Politik

Setelah Anda mempelajari pengertian pokok sosiologi politik pada Kegiatan Belajar 1, selanjutnya Anda perlu memahami perkembangan dan asal mula sosiologi politik pada Kegiatan Belajar 2 ini. Dengan mempelajari materi pada Kegiatan Belajar 2 ini diharapkan Anda mengetahui tokoh-tokoh yang memberikan kontribusi terhadap sosiologi politik dan pemikiran-pemikirannya. Lebih jauh Anda diharapkan mampu memahami lebih mendalam mengenai hakikat sosiologi politik.

Asal mula suatu disiplin ilmu, subjek atau bidang suatu studi demikian dinyatakan Rush dan Althoff sering tidak jelas. Dalam proses perkembangan ilmu sering kali terjadi penonjolan individu tertentu sebagai “bapak pendiri” yang justru sangat berbahaya dan menyesatkan. Dengan menonjolkan individu tertentu sebagai *bapak pendiri* bisa jadi menenggelamkan tokoh lain yang justru peranan dan sumbangannya terhadap disiplin, subjek atau bidang suatu studi tertentu lebih besar dan lebih bermakna. Contohnya dalam sosiologi, mungkin beberapa pembaca atau bahkan ilmuwan sosiologi merasa keberatan untuk menyebutkan Comte dan Spencer sebagai bapak pendiri sosiologis, tanpa mencantumkan Marx Durkheim atau Weber sebagai pendiri-pendirinya pula. Padahal justru Marx, Durkheim dan Weber-lah yang dianggap oleh sebagian besar ilmuwan sosiologi sebagai penyumbang terbesar perkembangan sosiologi ilmiah.

Perkembangan sosiologi politik dapat ditelusuri dari karya-karya pemikir ilmu-ilmu sosial. Karya sosiologi politik pertama yang bersifat ilmiah dapat ditemui dalam buku Montesquieu yang berjudul *Spirit of Law* (1748). Keilmiahannya itu dapat dilihat dari pernyataan: “Di sisi ini kita laporkan apa yang ada dan bukannya apa yang seharusnya ada” (Duverger, 2005).

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Rush dan Althoff (2005) tokoh yang dianggap cukup menonjol karena karyanya yang penting dan mendasar dalam sosiologi politik adalah Karl Marx (1818-1883) dan Max Weber (1864-1920). Sumbangan Marx sangat besar dan bervariasi dan tentu saja tidak hanya terbatas pada sosiologi politik. Pada dasarnya sumbangan Marx dapat digolongkan dalam tiga bidang teori umum, teori khusus dan metodologi. Mengikuti cara Hegel, Marx mengembangkan satu teori tentang “hal-hal yang tidak bisa dielakkan secara histories” (*Historical Inevitability*)

atas landasan dari tesis, antitesis dan sintesis yang dikenal dengan sebutan *dialektika*. Akan tetapi, berbeda dengan Hegel yang mendasarkan dialektikanya berdasarkan ide-ide, Marx mendasarkan teorinya pada konflik material dari kekuatan-kekuatan ekonomi yang saling bertentangan yang pada akhirnya menghancurkan sistem kapitalisme dan menciptakan masyarakat tanpa kelas yang disebut masyarakat komunis. Penafsiran Marx tentang sejarah dilandaskan pada dwi-sendi dari teori sosiologi dan teori ekonomi. Dia kemudian mengembangkan teori “nilai-kerja” dari David Hume menjadi teori “nilai-lebih” (*surplus value*) dan eksploitasi terhadap kerja, yang kemudian menjadi dasar bagi teori sosiologinya yang utama, yaitu perjuangan kelas. Dia juga mengembangkan teori keterasingan (*alienasi*) dengan argumentasi bahwa kelas pekerja atau kelas proletariat menjadi semakin terasingkan dari masyarakatnya. Pekerjaan mereka hanya sekadar dijadikan alat untuk menghindari kelaparan, dan bukan menjadi sarana untuk pernyataan diri. Berkait erat dengan teori perjuangan kelas dan alienasi ini adalah konsep kesadaran kelas, yaitu pengenalan oleh individu dalam masyarakat bahwa dia menjadi bagian dari kelompok-kelompok sosial yang tertindas atas dasar ekonomi. Kesadaran kelas ini kemudian menjadi prasyarat esensial bagi konflik kelas antara kelas *proletar* dengan kelas *borjuis* untuk kemudian menjadi pendorong bagi terjadinya perjuangan kelas bagi kelas proletar.

Banyak kritik yang dilontarkan oleh ilmuwan sosial terhadap teori-teori Marx. Beberapa di antaranya mengenai validitas umum dan lainnya adalah mengenai nilai-nilai prediktifnya. Mengenai validitas umum, misalnya pandangan Marx terhadap ide. Meskipun Marx tidak mengabaikan pentingnya ide sebagai faktor sosiologis, namun dia menganggapnya sebagai *variable dependen* (variabel yang terpengaruh) bukan sebagai *variabel-variabel yang bebas* (variabel yang mempengaruhi), dan mensubordinasikannya ke dalam interpretasi ekonomi dari sejarah. Pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa menurut Marx yang paling menentukan kehidupan manusia adalah materi bukan ide. Ide itu ada karena ada materi yang merangsang pikiran manusia dan selanjutnya karena materilah manusia bekerja (berproduksi). Dalam pada itu sejarah kehidupan manusia sangat ditentukan oleh materi (ekonomi) dalam hal ini adalah cara-cara berproduksi (*mode of production*). Oleh karena teori Marx ini bersandar pada materi (ekonomi) sebagai faktor tunggal yang menentukan sejarah kehidupan manusia (*histories materialism*) maka oleh ilmuwan sosial yang

kemudian disebut *economic determinism* (paham yang memandang ekonomi sebagai faktor penentu. Dari penjelasan ini tampaknya, Marx menempatkan ide pada posisi bawah (subordinasi) bukan di atas (superordinasi) sebagaimana pemikiran Hegel dan melihatnya sebagai variabel yang dipengaruhi (dependen) bukan sebagai variabel yang mempengaruhi (independen atau bebas). Pemikiran seperti ini yang dikritik oleh beberapa ilmuwan sosial yang kemudian mengenalnya sebagai validitas umum.

Kritik terhadap nilai-nilai prediktif terlihat dari kegagalan-kegagalannya terutama dalam meramalkan kompetensi adaptif dari sistem kapitalisme. Marx meramalkan bahwa pada fase terakhir dari sejarah kehidupan manusia akan ditandai hancurnya sistem kapitalisme dan digantikan oleh sistem komunisme masyarakat terakhir setelah terjadi konflik kelas yang dimenangkan oleh kaum proletar melalui perjuangan kelas. Ternyata ramalan Marx ini tidak terbukti karena kompetensi adaptif sistem kapitalisme sehingga konflik kelas tidak terjadi, apalagi masyarakat komunis yang tanpa kelas. Kegagalan-kegagalan inilah yang membuat teori-teori Marx menjadi diragukan orang.

Meskipun demikian, hal tersebut tidak mengurangi sumbangan Marx terhadap sosiologi politik. Kedua teori umumnya, yaitu determinisme ekonomi dan dialektika materialisme, dan teori-teori khususnya mengenai perjuangan kelas, kesadaran kelas, aliertasi, dan nilai-lebih semuanya merangsang pemunculan karya-karya lain. Beberapa di antaranya cenderung mendukung ide-ide Marx (kini bahkan para pendukungnya memunculkan ide neo-Marxis), sedangkan sebagian lain mencelanya.

Sumbangan Marx yang lain adalah dalam bidang metodologi. Usaha pengembangannya mengenai “sosialisme ilmiah” memberikan standar keilmuan dan metode-metode yang menjadi pendorong bagi ilmuwan-ilmuwan berikutnya. Marx selalu berusaha memberikan dasar yang kuat pada teori-teorinya dengan jalan menyajikan sejumlah besar pembuktian dan mengujinya dengan cara yang sistematis dan tepat serta teliti. Seberapa besar keberhasilan Marx dalam bidang metodologis ini masih menjadi perdebatan. Namun yang jelas, baik para pendukung maupun pengkritiknya harus berusaha keras, bila ingin menelaah teori Marx atau membangun teori baru.

Apakah Anda sudah paham sumbangan apa yang diberikan Karl Marx terhadap perkembangan Sosiologi Politik? Apabila belum, baca sekali lagi dan buat catatan kecil untuk menuliskan poin-poin kontribusinya.

Tokoh kedua yang juga sangat menonjol peranannya dalam mengembangkan sosiologi politik adalah Max Weber, salah seorang pengkritik teori-teori Marx. Sumbangan Weber tidak hanya kritik-kritik pokok terhadap teori-teori Marx, tetapi juga sejumlah studi-studi khusus dan konsep-konsep yang besar sekali artinya bagi sosiologi politik. Dalam karyanya *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* (1904-1905) dan studi-studinya mengenai India, Cina dan Yahudi, Weber berusaha menonjolkan faktor-faktor non ekonomis, terutama ide-ide yang menjadi faktor-faktor sosiologis yang amat penting, seperti kekuasaan dan status. Pikiran Weber ini jelas berbeda dengan Marx yang menonjolkan ekonomi sebagai faktor tunggal, dengan determinisme ekonominya. Dalam meneliti stratifikasi sosial di tengah bermacam-macam masyarakat, dia membuktikan bahwa strata sosial itu tidak hanya didasarkan pada “kelas” individualnya atau posisi ekonominya di dalam masyarakat, tetapi didasarkan pula pada status atau posisi sosialnya di tengah masyarakat atau pada posisi individualnya di dalam struktur kekuasaan di tengah masyarakat. Jadi menurut Weber strata sosial seseorang di dalam masyarakat dilandaskan pada kelas (posisi ekonomi), status dan kekuasaan.

Weber juga menyumbang beberapa ide konsepsional dan ide-ide metodologis yang penting artinya bagi sosiologi politik. Di antara sumbangannya dalam hal ide-ide konsepsional adalah tentang politik. Menurut Weber, politik adalah sarana perjuangan untuk bersama-sama melaksanakan politik (kekuasaan) atau perjuangan untuk mempengaruhi pendistribusian kekuasaan, baik di antara negara-negara ataupun di antara kelompok-kelompok di dalam suatu negara. Sedangkan negara didefinisikan sebagai komunitas (masyarakat) yang dengan sukses menurut monopoli penggunaan kekuatan-kekuatan fisik yang sah di dalam suatu teritorial tertentu.

Dari dua konsepsi di atas, tampaknya Weber dalam melihat politik dan negara sangat memperhatikan masalah pelaksanaan kekuasaan dan legitimasi (keabsahan). Konsep Weber mengenai legitimasi merupakan salah satu sumbangannya yang penting bagi sosiologi politik. Menurut Weber ada tiga tipe legitimasi yang utama, yaitu sebagai berikut.

1. Dominasi tradisional

Dominasi tradisional adalah kewibawaan “hari kemarin yang kekal”, yaitu adat-istiadat yang disucikan melalui pengakuan kuno yang tidak

bisa digambarkan dan orientasi kebiasaan untuk melakukan penyesuaian diri.

2. Dominasi kharismatik

Kharismatik adalah kewibawaan dengan keanggunan pribadi yang luar biasa, dan ketaatan yang mutlak serta kepercayaan terhadap wahyu, kepahlawan atau kualitas lainnya dari kepemimpinan individual.

3. Dominasi kebajikan legalitas

Dominasi kebajikan legalitas adalah kepercayaan akan validitas undang-undang dan “kompetensi” fungsional yang dilandasi peraturan-peraturan yang dibuat secara rasional.

Tiga tipe legitimasi itu, yaitu dominasi legal, kharismatik dan tradisional adalah murni atau merupakan tipe-tipe idea (*ideal types*) karenanya satu sama lain sifatnya tidak eksklusif. Konsep Weber mengenai tipe ideal itu secara sederhana ingin mengonstruksikan fakta histories yang bisa diamati ke dalam satu model, dengan mana gejala-gejala yang mirip dapat diukur.

Sumbangan Weber yang lain dalam bidang metodologis adalah konsep tentang pemahaman simpatetis atau *verstehen*. Menurut Weber, tingkah laku manusia itu akan lebih mudah dipahami, apabila ikut memperhitungkan motif-motif dan maksud mereka yang langsung terlibat dalam pelaksanaan tingkah laku itu. Dengan memperhitungkan motif-motif dan maksud yang ada dibalik tingkah laku itu maka tingkah laku manusia akan lebih mudah dipahami. Mengapa ia berbuat begini, mengapa ia berbuat begitu. Metode ini yang oleh Weber disebut *verstehen*. Dari hasil pemikirannya ini, Weber berkesimpulan akan pentingnya sumbangan kekuatan ide sebagai faktor-faktor sosial dan politik, berbeda dengan Marx yang lebih menekankan materi. Namun karena inilah karyanya mendapatkan banyak kritik dari kalangan ilmuwan lain, terutama dalam kaitan dengan sifat *bebas nilai*. Menurut para pengkritiknya, penelitian tentang motif-motif manusia itu adalah menyangkut elemen interpretatif, yang pada akhirnya tidak mungkin bersifat objektif dan karena itu berarti tidak bebas nilai. Padahal menurut Weber penelitian itu seharusnya bebas nilai. Kritik terhadap karya-karya Weber juga banyak dilontarkan atas dasar berbagai alasan, salah satunya adalah dalam kaitan dengan kecermatan histories. Namun demikian, seperti halnya karya Marx, karya-karya Weber ini menjadi perangsang bagi para ilmuwan politik dan sosiologi pada generasi-generasi berikutnya.

Selain Marx dan Weber, masih ada beberapa tokoh lain yang turut memberikan sumbangan terhadap perkembangan sosiologi politik. Meskipun boleh dikatakan kurang fundamental dan kurang menstimulir. Salah satu dari tokoh-tokoh tersebut di antaranya Alexis de Tocqueville (1905-1859). Dalam buku *Ancien Regime et la Revolution* (1856), Tocqueville memberikan argumentasi, bahwa Revolusi Perancis 1789 itu bukan merupakan pemutusan yang menyeluruh dengan masa silam, dan bahwa beberapa gerak kesinambungan pada akhirnya tidak bisa dihindarkan, yang kemudian bisa mengantisipasi pemunculan ide-ide di kemudian hari mengenai proses dan sifat-sifat dari perubahan sosial.

Tokoh lain ialah Walter Bagehot (1826-1877), seorang editor *The Economist* (1860-1877) dan seorang pengamat peristiwa-peristiwa politik selama periode tersebut yang hidup sezaman dengan Marx. Dia mempelajari mata rantai antara kebudayaan dengan kepribadian dan antara lembaga-lembaga politik dengan tingkah laku manusia. Dari studinya ia memperoleh gambaran mengenai karakter nasional dan bermacam-macam negara. Dalam karyanya *The English Constitution* (1867), ia menyatakan bahwa lembaga-lembaga politik Inggris itu berasal dari bermacam-macam sifat dari bangsa Inggris. Bagehot juga membedakan antara teori konstitusional dengan praktik, lalu mengemukakan masalah bagian-bagian konstitusi (Undang-undang Dasar) yang “bermartabat” dan yang “efisien”. Karya utama Bagehot yang lain dalam bidang sosiologi politik adalah *Physics and Politics* (1872). Dalam karyanya tersebut ia menjelaskan konsep evolusi pada asal mula dan perkembangan masyarakat-masyarakat manusia, dengan memberikan penekanan pada bagian-bagian yang dipengaruhi oleh proses peniruan.

Proses peniruan sebagai gejala sosial ini, justru menjadi ciri khas dari karya sosiolog Perancis Gabriel Tarde (1843-1904), salah seorang tokoh yang turut memberikan sumbangan terhadap perkembangan sosiologi politik. Pemikiran umum Tarde adalah mengenai kaitan antara sistem politik dengan struktur sosial masyarakat. Sumbangan Tarde lainnya adalah studinya mengenai pengaruh komunikasi modern, seperti telepon, telegraf, surat kabar dan buku-buku yang diproduksi secara massal dan memformulasikan kaitan-kaitan antara media massa dengan individu-individu. Dari hasil studinya tersebut ia berhasil menyusun teori-teori mengenai peranan individu sebagai “opinion leader” dan “komunikasi berarus dua langkah” (*two-step flow communication*). Dalam proses ini, ia menekankan peranan kaum elite, khususnya sebagai sarana untuk menyebarkan ide-ide.

Penyumbang lain terhadap perkembangan sosiologi politik adalah Vilfredo Pareto (1848-1923) dan Gaetano Mosca (1858-1941). Pareto dalam bukunya *The Mind and Society* dan Mosca dalam bukunya *The Ruling Class* mencoba menyangkal pemikiran Marxisme. Inti sangkalannya adalah bahwa kaum elite (kelas penguasa) tidak perlu mendapatkan posisinya karena supremasi ekonomisnya, dan bahwa perubahan sosial dan perubahan politik akan terjadi oleh adanya sirkulasi dari kaum elitnya yang tidak perlu didukung oleh faktor-faktor ekonomi. Pemikiran Pareto dan Mosca ini merangsang pemunculan teoretikus-teoretikus berikutnya, misalnya James Burnham dan C. Wright Mills, terutama dalam mengarahkan perhatian para sosiolog dan ilmuwan politik kepada gejala-gejala politik, seperti partai-partai politik dan kelompok-kelompok kepentingan.

Tokoh penyumbang yang pertama kali menyinggung partai-partai politik ialah Ostrogorski (1854-1919) dan Roberto Michels (1876-1936). Ostrogorski dengan bukunya *Democracy and the Organization of Political Parties* dan Roberto Michels dengan bukunya *Political Parties: Sociological Study of The Oligarchical Tendencies of Modern Democracy*, keduanya meneliti perkembangan organisatoris dari partai-partai politik, yang akhirnya mereka berdua memperoleh kesimpulan yang sama bahwa organisasi-organisasi tersebut tidak bisa terhindar dari dominasi oleh kelompok kecil yang terdiri dari aktivis-aktivis, dan bahwa control umum (oleh rakyat) ternyata bersifat pura-pura atau merupakan dalih belaka dan merupakan kemustahilan. Bagi Ostrogorski, partai politik menjadi “caucus politik” (rapat-rapat para anggota partai politik) yang tidak bisa dihindari, sedangkan menurut Michels semua organisasi politik merupakan sasaran bagi “hukum besi oligarki” (Oligarkhi adalah golongan atau kelompok yang berkuasa).

Tema lain yang menjadi perhatian para penyumbang perkembangan sosiologi politik adalah masalah pemilu. Contohnya ialah Stuart Rice yang menerbitkan buku *Quantitative Methods in Politics*, yang merupakan hasil studi mengenai tingkah laku pemilih dalam pemilihan suara di Amerika Serikat dari sejumlah sample dalam satu periode. Contoh lain adalah karya Rudolf Herbele mengenai sumber-sumber bantuan Nazi menjelang pencapaian kekuasaan tahun 1933.

Terpengaruh oleh perkembangan ilmu-ilmu sosial pada umumnya, mendorong para ilmuwan politik untuk meneliti peranan individu dalam politik. Peneliti yang paling terkenal mengenai hal ini ialah Harold Laswell dengan bukunya *Psychopathology and Politics* dan *Politics: Who Gets What*,

When, and How?. Pemusatan pada individu sebagai unit analisis membawa akibat munculnya reaksi dalam bentuk minat yang semakin bertambah terhadap kaitan antara kebudayaan dengan politik, serta hubungan antara perkembangan ekonomi dengan sistem-sistem politik. Contoh penting dari karya-karya dalam bidang ini adalah *The Civic Culture* oleh Gabriel Almond dan Sidney Verba, dan *Politics in Developing Areas* dengan Gabriel Almond dan James Coleman sebagai editor, serta buku *Political Man* dan *The First New Nation* karangan Seymour Martin Lipset.

Demikian beberapa tokoh dan pemikirannya yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan sosiologi politik. Untuk lebih memantapkan pemahaman Anda tentang perkembangan sosiologi politik coba Anda buat matriks ikhtisar tokoh dan kontribusinya seperti terlihat dalam Tabel 1.1. Dalam mengisi matriks ini Anda diharapkan bekerja sama dengan teman-teman Anda. Kerjakan dalam kelompok kecil, dan diskusikan secara intensif dalam kelompok kecil. Setelah lengkap silakan diperbandingkan dengan kelompok lain sehingga diperoleh matriks yang sempurna. Perlu diperhatikan pula, uraian dalam kegiatan belajar ini tidak cukup informasi untuk mengisi matriks yang ada. Oleh karena itu, cari literatur atau sumber informasi lain untuk melengkapinya.

Tabel 1.1
Ikhtisar Tokoh-tokoh Penyumbang Perkembangan Sosiologi Politik

No.	Nama Tokoh	Masa Hidup	Buku yang Dihasilkan	Kontribusi Pemikiran	
				Teori	Metodologi
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
Dst.					



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Mengapa Karl Marx dan Max Weber dianggap sebagai tokoh yang paling besar perannya terhadap perkembangan sosiologi politik (bapak pendiri)?
- 2) Apa sumbangan Karl Marx dan Max Weber dalam hal ide-ide konsepsional?
- 3) Apa pula sumbangan Karl Max dan Max Weber dalam bidang metodologis?
- 4) Jelaskan bahwa metode Verstehen Max Weber dianggap oleh ilmuwan pengritiknya bertentangan dengan sifat studi yang bebas nilai?
- 5) Reaksi apa yang muncul dalam studi sosiologi politik sebagai akibat pemusatan perhatian pada individu sebagai unit analisis?

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Karl Marx dan Max Weber dianggap sebagai bapak pendiri sosiologi politik karena karyanya punya pengaruh terhadap ilmuwan generasi berikutnya. Pengaruh ini yang perlu Anda jelaskan.
- 2) Jawaban latihan 2 ini bias dilihat dari karya-karya Karl Marx dalam hal teori umum, teori khusus, dan karya Max Weber dalam hal ide-ide konsepsional.
- 3) Dapat dilihat dari karya Karl Marx dan Max Weber mengenai metodologi yang secara akademis memiliki ciri-ciri dan sebutan masing-masing.
- 4) Pahami dulu apa itu Verstehen dan pahami pula apa artinya bebas nilai. Dengan pemahaman tepat maka Anda akan dapat menjelaskan mengapa Verstehen dikatakan bertentangan dengan bebas nilai.
- 5) Akibat dari pemikiran Harold Laswell yang muncul pada karya-karya Gabriel Almond dan Sidney Verba, Gabriel Almond dan James Coleman, serta Seymour Martin Lipset.



RANGKUMAN

Asal mula sosiologi politik sebagai bidang suatu studi sulit ditetapkan secara pasti. Namun demikian, bisa ditelusuri dari karya-karya sosiolog atau ilmuwan politik mengenai tema-tema sosiologi politik. Dua tokoh besar yang bisa dianggap sebagai "bapak pendiri" sosiologi politik karena karyanya yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan sosiologi politik, baik dalam hal teori atau konsep maupun metodologi ialah Karl Marx dan Max Weber. Beberapa tokoh lain yang memberikan sumbangan terhadap perkembangan sosiologi politik ialah Alexis de Tocqueville, Walter Bagehot, Gabriel Tarde, Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca, Ostrogroski, Roberto Michels, Stuart Rice, Harold Laswell, Gabriel Almond, Sidney Verba, James Coleman, dan Seymour Martin Lipset.



TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Dalam melihat sejarah, Marx mengikuti cara berpikir Hegel yang dikenal dengan istilah dialektika. Dialektika adalah cara berpikir yang terdiri atas
 - A. tesa - antitesa – sintesa
 - B. tesa - analisa – sintesa
 - C. antitesa - tesa – sintesa
 - D. sintesa - tesa – antitesa

- 2) Bentuk masyarakat terakhir menurut Marxisme adalah masyarakat komunis, yaitu
 - A. masyarakat sejahtera lahir batin
 - B. masyarakat yang sama rasa dan sama rata
 - C. masyarakat tanpa kelas
 - D. masyarakat proletar

- 3) Salah satu teori khusus yang dihasilkan Marx adalah tentang Alienasi atau keterasingan, yang dimaksud keterasingan menurut Marx adalah
 - A. keterasingan kaum buruh dari masyarakatnya
 - B. keterasingan kaum buruh dari tempat tinggalnya
 - C. keterasingan kaum buruh dari kaum borjuis
 - D. keterasingan kaum buruh dari keluarganya

- 4) Weber membantah pemikiran Marx bahwa stratifikasi sosial dalam masyarakat hanya dilandaskan pada faktor ekonomi. Menurutnya faktor-faktor yang turut menentukan posisi seseorang dalam strata sosial adalah
 - A. ekonomi, politik, dan budaya
 - B. kelas, status, dan agama
 - C. kekayaan, kekuasaan, dan kehormatan
 - D. kelas, status, dan kekuasaan

- 5) Menurut Weber ada tiga tipe legitimasi yang ada di dalam masyarakat. Ketiga tipe legitimasi itu adalah
 - A. tradisional, legalitas, dan modernitas
 - B. legalitas, yuridikitas, dan formalitas
 - C. tradisional, kharismatik, dan legalitas
 - D. kharismatik, tradisional, dan yuridikitas

- 6) Dari suatu hasil studi di berbagai negara disimpulkan bahwa lembaga-lembaga politik di Inggris berasal dari bermacam-macam sifat dari bangsa Inggris. Kesimpulan ini dikemukakan oleh Walter Bagehot dalam
 - A. The Economist
 - B. The English Constitution
 - C. Physics and Politics
 - D. The Mind and Society

- 7) Dari studinya mengenai pengaruh komunikasi modern, Gabriel Tarde menyimpulkan bahwa kaum elite mempunyai peran besar dalam
 - A. menyebarkan isu-isu
 - B. menyaring berbagai informasi
 - C. menyebarkan ide-ide
 - D. menerima bermacam-macam informasi

- 8) Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca menyangkal pemikiran Marxisme, bahwa posisi elite dalam kekuasaan ditentukan oleh supremasi ekonomi, alasannya
 - A. perubahan politik terjadi oleh adanya sirkulasi dari kaum elite yang tidak ditentukan faktor ekonomi
 - B. perubahan politik sering kali terjadi karena adanya revolusi, bukan karena faktor ekonomi

- C. perubahan politik terjadi karena adanya pergantian kaum elite secara teratur melalui pemilu
 - D. faktor ekonomi hanya berpengaruh terhadap posisi elite dalam bidang ekonomi
- 9) Dari studinya mengenai partai politik Ostrogorski dan Roberto Michel memperoleh kesimpulan bahwa
- A. partai politik merupakan perwujudan aspirasi anggota
 - B. kontrol umum masyarakat dilakukan sungguh-sungguh
 - C. partai politik tidak bisa menghindari dominasi kelompok-kelompok kecil para aktivis
 - D. kontrol umum masyarakat berjalan secara efektif
- 10) Salah satu tipe legitimasi menurut Max Weber adalah dominasi kharismatik. Tipe legitimasi ini bisa muncul pada seseorang karena beberapa sebab, di antaranya, *kecuali*
- A. kewibawaan dan keanggunan pribadi yang luar biasa
 - B. ketaatan yang mutlak serta kepercayaan terhadap wahyu
 - C. kepahlawanan atau kualitas lain dan kepemimpinan individual
 - D. kekayaan yang luar biasa yang dimanfaatkan secara sosial

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
 80 - 89% = baik
 70 - 79% = cukup
 < 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 3**Pendekatan dan Peranan Sosiologi Politik**

¶ Pada Kegiatan Belajar 1 dan 2 Anda telah mempelajari pengertian pokok dan perkembangan sosiologi politik dengan baik. Mudah-mudahan Anda telah memahami apa itu sosiologi politik dan mengetahui tokoh-tokoh serta sumbangan pikirannya terhadap perkembangan sosiologi politik. Sebagai penutup Modul 1, Kegiatan Belajar 3 ini menyajikan materi tentang pendekatan dan metode yang digunakan dalam studi sosiologi politik serta peranan sosiologi politik itu sendiri sebagai bidang subjek. Dengan mempelajari pendekatan dan metode yang digunakan dalam sosiologi politik maka diharapkan pemahaman Anda tentang hakikat sosiologi politik semakin mantap. Demikian pula setelah Anda mengkaji peranan sosiologi politik bagi pembangunan, khususnya dalam pembangunan politik maka makin komprehensiflah pemahaman Anda terhadap hakikat sosiologi politik. Lebih jauh, diharapkan Anda dapat menunjukkan peran positif dalam kehidupan politik di lingkungan terdekat Anda.

A. PENDEKATAN DAN METODE

Pendekatan adalah orientasi khusus atau titik pandang tertentu yang digunakan dalam studi-studi sosiologi politik. Berdasarkan batasan-batasan ini Rush dan althoff (2005) mengemukakan empat pendekatan yang biasa digunakan dalam studi-studi sosiologi politik. Keempat pendekatan itu adalah sebagai berikut.

1. Pendekatan Historis

Pendekatan historis atau pendekatan sejarah adalah satu pendekatan yang digunakan untuk mengungkapkan fakta atau peristiwa dan kesimpulan mengenai hal-hal yang telah lalu. Pendekatan historis harus dilakukan secara sistematis dan objektif melalui proses pencarian, evaluasi, dan penafsiran bukti-bukti yang dapat dipakai untuk mempelajari masa lalu. Berdasarkan bukti-bukti yang ada itu ditarik kesimpulan mengenai masa lalu bagaimana dan mengapa peristiwa itu terjadi serta bagaimana keterkaitannya dengan masa kini.

Dalam menarik kesimpulan pendekatan ini memerlukan sumber-sumber sejarah. Dalam hal ini ada dua macam sumber sejarah: sumber pertama dan sumber kedua. Contoh dari sumber pertama adalah dokumen *relics* (barang peninggalan) atau *artifak* (benda-benda bersejarah). Sumber-sumber ini adalah hasil langsung dari kejadian atau catatan para saksi mata. Termasuk juga dalam sumber pertama ini adalah narasumber sebagai pelaku peristiwa sejarah. Sumber kedua adalah laporan yang didasarkan pada catatan atau sumber pertama. Termasuk dalam sumber kedua adalah buku sejarah, artikel dalam ensiklopedia dan kupasan dari hasil penelitian.

Pendekatan ini digunakan karena memberikan perspektif yang diperlukan bagi studi-studi yang lain baik dalam pengertian kontekstual maupun temporal. Contoh studi yang menggunakan pendekatan ini adalah studi yang dilakukan oleh Karl Marx dan Marx Weber.

2. Pendekatan Komparatif (Perbandingan)

Pendekatan komparatif adalah pendekatan dengan cara memperbandingkan data-data atau gejala-gejala politik mengenai fenomena yang sama atau fenomena yang kontras (berlawanan) dari suatu masyarakat tertentu dengan masyarakat lainnya. Menurut Ramlan A. Surbakti (dalam Suyanto, 2005), perbandingan sebagai metode ilmiah akan mempertajam kemampuan kita mendeskripsikan dan dapat menjadi perangsang dalam menyusun konsep. Menurutnya, perbandingan akan menyajikan kriteria untuk menguji hipotesis, menyumbang bagi perumusan hipotesis secara induktif dan bagi perumusan teori (*theoretical building*) baru. Oleh karena itu, Harold Laswel (dalam Suyanto, 2005) menyatakan bahwa perbandingan adalah metode ilmiah yang penting dalam melakukan analisis ilmiah.

Pendekatan perbandingan pernah dilakukan dalam berbagai studi, misalnya oleh Ostrogorski dalam studinya tentang partai-partai politik dan Almond dan kawan-kawan beserta Lipset dalam studinya mengenai lingkungan politik (budaya politik). Studi Almond dan Verba merupakan contoh terbaik dari penggunaan pendekatan ini. Mereka meneliti kebudayaan politik demokratis di lima Negara di dunia, yakni Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Italia, dan Meksiko. Dari data-data survei yang diadakan di lima Negara ini kemudian diperbandingkan untuk dianalisis dan ditarik kesimpulan mengenai kebudayaan politik mereka apakah demokratis atau sebaliknya.

3. Pendekatan Institusional

Pendekatan institusional adalah pendekatan yang digunakan dalam studi yang memusatkan perhatian pada faktor-faktor kelembagaan, konstitusional, dan legalistik. Dari sudut pandang ini tingkah laku politik selalu berlangsung di dalam satu kerangka institusional. Oleh karena itu, baik tingkah laku maupun lembaga-lembaga tidak dapat dijelaskan secara tepat tanpa memahami keduanya sekaligus. Pendekatan ini secara implisit banyak dilakukan dalam studi-studi mengenai partai-partai politik dan tingkah laku legislatif.

Sejak lama pendekatan institusional telah mendapat kecaman. Pendekatan ini dianggap tidak memadai dan tidak realistis karena mengabaikan realitas tingkah laku politik. Kecaman inilah yang kemudian melahirkan pendekatan baru yang kontras dengan pendekatan institusional, yaitu pendekatan behavioral.

4. Pendekatan Behavioral

Pendekatan behavioral adalah pendekatan yang memperhatikan secara khusus tingkah laku atau perangai. Pendekatan ini secara khas menekankan individu sebagai unit dasar dari analisis. Dalam penggunaan pendekatan ini perlu memisahkan fakta dengan nilai-nilai, dan dalam membuat generalisasi harus didasarkan verifikasi.

Behaviorisme dianggap mengakibatkan kekakuan pada sikap orang yang melakukan penganalisisan politik dan sosial karena menggunakan standar-standar yang tinggi atau menggunakan tingkat berpikir dan penguasaan konsep yang tinggi. Di samping itu, pendekatan ini juga dikecam orang karena mengabaikan segi-segi yang menguntungkan dari pendekatan-pendekatan jenis lain. Terutama dalam kaitan dengan ketepatan dan ketelitian analisis data.

Itulah beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam studi-studi sosiologi politik. Di antara pendekatan-pendekatan tersebut tidak ada yang lebih unggul dari lainnya. Semua pendekatan tersebut sama bermanfaatnya dalam studi-studi sosiologi politik, tergantung pada sifat permasalahan yang akan diteliti.

Di samping pendekatan sebagaimana disebutkan di atas, terdapat pula beberapa metode yang digunakan dalam studi-studi sosiologi politik. Metode-metode tersebut di antaranya sebagai berikut.

5. Metode Kuantitatif

Metode kuantitatif adalah metode yang menggunakan data-data kuantitatif (data dalam bentuk angka-angka) dan kumpulan data (data agregatif) yang dikumpulkan melalui survei-survei statistik untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik-teknik statistik. Teknik statistik yang dimaksudkan studi sosiologi politik yang menggunakan metode ini adalah studi mengenai ekologi (lingkungan) politik atau studi mengenai budaya politik.

Cara-cara pembuktian dengan menggunakan tes-tes statistik tersebut mempunyai nilai yang sangat positif. Terutama untuk melihat kaitan antarfaktor apakah hubungan tersebut bersifat kebetulan atau terjadi secara signifikan. Terjadi secara signifikan artinya hubungan tersebut tidak terjadi secara kebetulan melainkan benar-benar terjadi meyakinkan atau berarti. Cara-cara pembuktian semacam ini sekarang banyak dilakukan oleh para ahli dalam rangka mengembangkan sosiologi politik secara ilmiah.

6. Metode Kualitatif

Berbeda dengan metode kuantitatif, metode ini tidak menyandarkan diri pada data-data kuantitatif yang berbentuk angka-angka untuk keperluan analisis dan penarikan kesimpulan tentang permasalahan studi. Metode ini lebih menekankan data-data kualitatif berupa catatan peristiwa atau perilaku atau proses dari objek-objek studi, baik lembaga maupun perilaku politik.

Metode kualitatif juga dicerminkan oleh proses penganalisisan yang tidak menyandarkan pada statistika sebagai alat bantu guna menarik suatu kesimpulan. Teknik analisis data pada umumnya menggunakan teknik deskriptif analitis yang lebih banyak menyandarkan pada kekuatan dan ketajaman berpikir peneliti, termasuk penguasaan konsep-konsep dan teori-teori yang relevan dengan permasalahan studi.

B. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Data-data kuantitatif maupun kualitatif sebagaimana disebutkan di atas, dapat diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data, di antaranya melalui berikut ini.

1. Wawancara intensif (mendalam), termasuk penggunaan studi-studi panel dan mencakup pula wawancara secara periodik terhadap responden-responden atau informan yang sama.

2. Studi-studi kasus (*case studies*) atau sekarang sering disebut *Focus Group Discussion*. Teknik ini merupakan perluasan dari teknik wawancara, yaitu pelaksanaan secara group dengan para ahli atau narasumber.
3. Observasi (pengamatan), baik dalam bentuk partisipasi langsung atau pengamatan terlibat (*participatory observation*) maupun tidak langsung atau pengamatan tidak terlibat.
4. Angket, yaitu menyebarkan kuesioner (daftar pertanyaan) kepada responden yang sesuai dengan permasalahan studi.

Penggunaan wawancara mendalam sangat penting untuk mengetahui motif dan nilai dari mereka (responden) yang terlibat dalam proses politik. Studi kasus juga sangat berarti untuk mengungkapkan permasalahan studi secara lebih mendalam dan mendasar. Demikian pula teknik observasi baik langsung sebagai pelaku dalam proses politik maupun hanya sebagai pengamat sering kali menjadi metode yang efektif. Teknik angket sangat bermanfaat, jika responden relatif banyak dan dalam waktu yang relatif singkat.

Di samping pendekatan, metode dan teknik pengumpulan data sebagaimana disebutkan di atas dalam studi sosiologi politik digunakan pula teori-teori dan model-model yang keduanya diperlukan untuk memperoleh garis-garis pedoman bagi penelitian, dan untuk memberikan penjelasan-penjelasan terhadap gejala-gejala yang tengah dipelajari. Menurut Alex Inkeles, teori didefinisikan sebagai perlengkapan yang heuristik untuk mengorganisir segala sesuatu yang kita ketahui, atas segala sesuatu yang kita duga diketahui pada satu waktu tertentu, lebih kurang mengenai pertanyaan atau isu yang diajukan secara eksplisit. Sedangkan model didefinisikan sebagai “kesan umum dari bagan pokok suatu gejala, termasuk di dalamnya ide-ide tuntutan mengenai sifat-sifat dari unit-unit yang tercakup di dalamnya serta pola hubungan antarunit-unit tersebut.”

Contoh teori yang menarik perhatian para sosiolog politik adalah apa yang dikenal dengan teori sistem yang memberikan argumentasi bahwa semua gejala sosial merupakan bagian dari pola tingkah laku yang konsisten, internal, reguler, dan dapat dilihat serta dibedakan. Teori sistem demikian disebut sistem sosial, yang di dalamnya terdapat sejumlah subsistem-subsistem yang saling bergantung, seperti ekonomi dan politik. Masing-masing subsistem tadi mungkin masih bisa dibagi lagi, misalnya sistem

ekonomi atau sistem politik masih bisa dibagi-bagi lagi dalam bagian-bagian yang lebih kecil lagi.

Salah seorang penganjur utama dari teori sistem ialah Talcot Parsons, yang menulis buku *The Social System*. Parsons dan beberapa sosiolog lainnya, seperti Marion Levy dan Robert K. Merton dikenal sebagai penggagas pendekatan fungsional terhadap teori sistem. Istilah fungsi ini didefinisikan sebagai konsekuensi objektif dari suatu pola aksi dari sistemnya. Fungsionalisme ini sangat bergantung pada pandangan Parsonian, yang menyatakan bahwa suatu sistem cenderung mengarah pada sasaran khusus (tujuan), dan bahwa semua tingkah laku dan fenomena selalu berkaitan dengan tujuan itu. Gejala ini kemudian mengarahkan perhatian pada pengembangan fungsionalisme struktural, yang membuktikan bahwa semua tingkah laku sosial dan semua gejala (merupakan pola-pola kasi atau struktur-struktur tertentu) bisa memenuhi atau justru sebaliknya, gagal memenuhi fungsi-fungsi khusus bagi sistemnya.

Seperti halnya teori-teori lain, fungsionalisme struktural ini juga banyak mendapat kecaman karena dianggap tidak mampu secara tepat memperhitungkan perubahan yang sistematis. Bahkan secara ideologis dianggap menjurus pada arah yang statis atau konservatisme.

Dalam bidang politik, studi yang menggunakan salah satu alternatif dari pendekatan fungsional ini dapat ditemukan dalam buku David Easton *The Political System, A Framework for Political Analysis and A System Analysis of Political Life*. Alternatif tersebut dikenal dengan nama analisis masukan-masukan (input-output analysis). Perhatian utama Easton adalah mengenai bagaimana caranya satu sistem politik dapat tetap hidup, dan sebab-sebab apakah yang dapat mengadakan perubahan terhadapnya. Ia menduga, bahwa orang perlu memberikan sumbangan-sumbangan tertentu kepada sistem politik dalam bentuk masukan-masukan (inputs). Masukan-masukan ini baik berupa tuntutan-tuntutan untuk bertindak, atau berupa dukungan terhadap sistemnya. Melalui proses konversi, keluaran (output) dalam bentuk keputusan-keputusan otoritatif dapat diproduksi (dihasilkan). Selanjutnya, bisa juga muncul suatu proses reaksi terhadap keputusan-keputusan tadi yang disebut dengan istilah “feedback” atau umpan balik.

Teori Easton ini kemudian oleh Gabriel Almond diadaptasikan dalam kerangka fungsional-struktural, yang disebut dengan istilah pendekatan perkembangan (*developmental approach*) terhadap politik. Pendekatan struktural-fungsional ini digunakan dalam studi-studinya yang mengaitkan

lembaga-lembaga dengan proses-proses. Tidak hanya sekadar lembaga-lembaga politik sebagaimana pendekatan “tradisional”.

Sebagian besar dari teori-teori tadi menggunakan model yang bermacam-macam untuk menggambarkan dan menjelaskan alasan-alasan yang mendasari teori-teori tersebut. Demikian pula, dalam mempelajari sosiologi politik hendaknya kita menggunakan model-model yang tampaknya cocok bagi konsep-konsep yang dianggap penting. Penggunaan model-model tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan konsep-konsepnya, bukan sebagai pengganti konsep-konsep tersebut.

C. PERANAN SOSIOLOGI POLITIK

Sebagai ilmu (meskipun bukan disiplin ilmu) seperti juga ilmu-ilmu lain, sosiologi politik mempunyai peranan atau manfaat. Peranan atau manfaat itu bukan hanya bagi perkembangan ilmu itu sendiri, melainkan juga bagi kehidupan manusia atau masyarakat pada umumnya. Apalagi bagi masyarakat yang sedang melaksanakan pembangunan, seperti bangsa Indonesia, sosiologi politik mempunyai peranan yang cukup penting, khususnya dalam melaksanakan pembangunan politik.

Dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah atau badan atau organisasi tertentu biasanya pada tahap awal melakukan perencanaan yang matang agar dapat memperoleh hasil yang baik. Untuk itu diperlukan data-data pendukung yang lengkap, khususnya mengenai masyarakat yang akan dikenai pembangunan. Dalam pembangunan politik masyarakat atau bangsa, paling tidak diperlukan data-data mengenai hal-hal, sebagai berikut.

1. Pola interaksi sosial dan pola interaksi politik. Dengan mengetahui pola interaksi sosial dan politik yang ada dalam masyarakat maka dapat digariskan kebijakan-kebijakan tertentu untuk memperkuat pola interaksi yang mendukung pembangunan atau menetralsir pola interaksi yang menghalangi pembangunan. Pola interaksi yang didasarkan efisiensi, misalnya perlu terus diperkuat dan dikembangkan secara meluas untuk lebih memberhasilkan pembangunan. Sebaliknya, pola interaksi yang didasarkan persaingan tidak sehat harus dinetralsir dan mengubahnya menjadi pola interaksi yang didasarkan persaingan sehat.
2. Kelompok-kelompok sosial dan politik yang menjadi bagian masyarakat. Ada kelompok-kelompok sosial dan politik yang mendukung

- pembangunan dan mungkin juga ada yang kurang mendukung. Hal ini perlu diketahui untuk pengambilan garis kebijakan pembinaan.
3. Kebudayaan yang berintikan nilai-nilai. Di dalam masyarakat ada nilai-nilai yang mendukung pembangunan, ada yang tidak mempunyai pengaruh negatif terhadap pembangunan dan ada pula yang menghalangi pembangunan. Terhadap nilai-nilai kebudayaan yang menghalangi pembangunan perlu proses transformasi dan ini diperlukan kebijakan pendidikan politik yang relevan.
 4. Lembaga-lembaga atau pranata-pranata sosial dan politik yang merupakan kesatuan kaidah-kaidah yang berkisar pada kebutuhan dasar manusia dan kelompok sosial atau politik.
 5. Stratifikasi sosial yang merupakan pembedaan penduduk dalam kelas-kelas atau strata sosial tertentu secara vertikal. Hal ini penting untuk melihat dan menentukan pihak mana yang dapat dijadikan pelopor pembangunan atau agen pembangunan.

Pada tahap pelaksanaan, perlu diadakan identifikasi terhadap kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengadakan penelitian tentang pola-pola kekuasaan dan wewenang di dalam masyarakat baik yang resmi maupun yang tidak. Dengan mengetahui kekuatan sosial tersebut dapat diketahui unsur-unsur mana yang dapat melancarkan pembangunan atau sebaliknya unsur-unsur mana pula yang menghambat.

Dalam tahap pelaksanaan, penelitian terhadap perubahan sosial juga sangat penting. Dengan penelitian ini maka akan dapat diketahui kadar keberhasilan pembangunan apakah berimplikasi positif atau negatif. Perubahan yang akibatnya positif perlu dilembagakan sehingga kemudian menjadi membudaya. Sedangkan perubahan yang negatif perlu segera dinetralisir, agar tidak menjadi kebudayaan tandingan (*counter culture*) dalam masyarakat yang bersifat destruktif (merusak).

Hasil studi yang telah dilakukan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan ini dapat digunakan sebagai bahan yang akan dinilai pada tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi ini penilaian dapat menggunakan berbagai ilmu pengetahuan, bukan hanya sosiologi politik, sosiologi ataupun ilmu politik.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Apa yang dimaksud dengan istilah pendekatan dan apa bedanya dengan metode?
- 2) Mengapa pendekatan historis tidak dapat dilakukan oleh sembarang ilmuwan melainkan harus oleh ilmuwan ahli?
- 3) Jelaskan apa yang dimaksud dengan metode kuantitatif dan apa keunggulannya!
- 4) Apa yang dimaksud dengan pengamatan terlibat dan apa kebaikannya?
- 5) Apa peranan sosiologi pada tahap perencanaan pembangunan?

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Pendekatan dalam bahasa asingnya “approach”. Pengertiannya didasarkan pada titik pandang yang akan dikaji dalam suatu studi atau penelitian. Sedangkan metode merupakan cara melakukan sesuatu. Dari pengertian istilah ini Anda akan bisa membedakannya jika dilihat dalam praktik penelitian.
- 2) Pendekatan historis adalah mengkaji sesuatu peristiwa masa lalu didasarkan atas bukti-bukti atau sumber sejarah. Hal ini tentu saja tidak bisa dilakukan sembarang orang termasuk ilmuwan yang belum benar-benar ahli karena dituntut kompetensi-kompetensi tertentu.
- 3) Ciri utama pendekatan kuantitatif adalah penggunaan data-data yang berupa angka-angka dan dalam mengambil kesimpulan menggunakan statistika. Keunggulannya dapat dilihat bila dikaitkan dengan metode ilmiah sebagai sarana pengembangan ilmu.
- 4) Pengamatan terlibat berarti peneliti sebagai pelaku dalam proses karena ia terlibat langsung maka ia akan punya keunggulan dalam memperoleh data jika menggunakan orang lain.
- 5) Peranan sosiologi politik lebih kurang sama dengan ilmu-ilmu lain, khususnya dalam rangka pembangunan. Melalui tahapan-tahapan pembangunan ini sosiologi politik turut berperan.



RANGKUMAN

Pendekatan adalah orientasi khusus atau titik pandang tertentu yang digunakan dalam studi atau penelitian sosiologi politik. Ada 4 pendekatan yang umum dilakukan dalam studi sosiologi politik, yaitu (1) pendekatan historis, (2) pendekatan komparatif, (3) pendekatan institusional, dan (4) pendekatan behavioral.

Metode adalah cara yang dilakukan dalam studi sosiologi politik termasuk teknik analisis data guna mengambil kesimpulan. Ada dua metode yang dikenal, yaitu (1) metode kuantitatif, yang menggunakan data-data kuantitatif (angka-angka) dan tes-tes statistika dalam pengambilan kesimpulan, (2) metode kualitatif, yang menggunakan data-data kualitatif (verbal) dan tidak menggunakan teknik-teknik statistika dalam mengambil kesimpulan.

Untuk memperoleh data bisa menggunakan teknik wawancara, studi kasus, pengamatan baik terlibat maupun tidak, dan teknik angket. Teori dan model digunakan pula dalam studi-studi sosiologi politik guna memberikan pedoman bagi pelaksanaan penelitian.

Sosiologi politik, melalui penelitian-penelitian yang dilakukan dapat berperan dalam pembangunan, khususnya pembangunan politik. Peranan tersebut terutama dalam menyediakan data-data hasil penelitian guna keperluan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.



TES FORMATIF 3

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Pendekatan historis menggunakan sumber-sumber sejarah yang terdiri atas dua macam sumber, yakni sumber pertama dan sumber kedua. Termasuk dalam sumber pertama adalah
 - A. catatan saksi mata dan catatan dari sumber pertama
 - B. dokumen dan buku sejarah
 - C. catatan dari pelaku sejarah
 - D. artikel laporan hasil penelitian

- 2) Pendekatan komparatif disebut juga dengan pendekatan perbandingan, yang dibandingkan dalam studi ini adalah
 - A. antara peneliti satu dengan peneliti lainnya
 - B. data atau gejala dari satu masyarakat dengan masyarakat lainnya
 - C. antara hasil wawancara dengan hasil pengamatan
 - D. data dari satu waktu ke waktu lainnya

- 3) Pendekatan institusional merupakan satu pendekatan yang paling lama digunakan dalam studi-studi sosiologi politik. Pendekatan ini memusatkan perhatian pada faktor-faktor
 - A. konstitusional dan legalistik
 - B. sosial dan budaya
 - C. individual dan sosial
 - D. kelompok dan lembaga sosial

- 4) Pendekatan behavioral boleh dikatakan lebih baru dari pendekatan institusional, yang menjadi ciri pendekatan behavioral di antaranya, *kecuali*
 - A. memperhatikan secara khusus tingkah laku dan perangai
 - B. mengakibatkan keleluasaan pada orang yang melakukan analisis
 - C. menekankan individu sebagai unit analisis
 - D. menggunakan tingkat berpikir dan konsep yang tinggi

- 5) Metode penelitian yang sering digunakan dewasa ini dalam studi-studi sosiologi politik ialah metode kuantitatif. Ciri utama metode ini adalah penggunaan data
 - A. kuantitatif dan tes-tes statistika
 - B. kuantitatif dan pengambilan kesimpulan penelitian
 - C. kuantitatif dan teknik pengambilan data melalui pengamatan
 - D. berupa angka dan teknik analisis deskriptif

- 6) Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti sendiri dalam suatu proses sosial atau politik sebagai pelaku disebut
 - A. wawancara mendalam
 - B. wawancara terbuka
 - C. pengamatan terlibat
 - D. pengamatan langsung

- 7) Dalam suatu penelitian sosiologi politik diperlukan pula teori dan model, khususnya untuk menjadi pedoman dalam
 - A. merencanakan penelitian
 - B. melaksanakan penelitian
 - C. mengevaluasi hasil penelitian
 - D. membuat kesimpulan penelitian

- 8) Parsons, Levy, dan Merton terkenal sebagai penganjur teori sistem yang dikenal dengan struktural fungsional. Inti dari teori ini didasarkan pada proposisi
- suatu sistem mengarah pada sasaran-sasaran khusus
 - semua tingkah laku dan fenomena selalu berkaitan dengan tujuan
 - semua tingkah laku dan gejala bisa memenuhi atau gagal memenuhi sistemnya
 - semua tingkah laku dikatakan berfungsi jika sesuai dengan strukturnya
- 9) Dalam bidang studi politik, David Easton dikenal sebagai pengikut aliran fungsionalisme. Hal ini terlihat dari karyanya yang memberikan alternatif pendekatan ini yang dikenal dengan analisis masukan-keluaran (*input-output analysis*), yang unsur-unsurnya terdiri atas
- proses - input - output
 - tuntutan - proses - keputusan otoritatif
 - dukungan - proses - keputusan otoritatif
 - input - proses - output
- 10) Hasil-hasil studi sosiologi politik mempunyai peranan bagi perencanaan pembangunan bangsa Indonesia, khususnya dalam tahap perencanaan. Dalam tahap pelaksanaan data yang diperlukan terutama adalah data mengenai
- perubahan sosial
 - interaksi sosial
 - kelompok-kelompok sosial
 - stratifikasi sosial

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) B. August Comte adalah orang yang pertama mengemukakan istilah sosiologi.
- 2) D. Sosiologi modern lebih menekankan tingkah laku, baik individual maupun kolektif, dalam konteks sosial.
- 3) A. Rakyat tidak menjadi fokus dalam perumusan batasan-batasan mengenai politik sehingga konsep rakyat tidak termasuk dalam konsep-konsep utama politik.
- 4) C. Kekuasaan dan wewenang sangat diperlukan oleh pengambil keputusan agar kebijakan-kebijakan itu dapat dilaksanakan. Tanpa kekuasaan dan kewenangan kebijakan-kebijakan itu akan sulit terlaksana.
- 5) D. Duverger mengklasifikasikan konsepsi ilmu politik dalam dua pengertian, yaitu tentang negara dan kekuasaan.
- 6) C. Di dalam masyarakat sekecil apa pun secara substansial pasti ada perbedaan-perbedaan ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Hal yang lebih tinggi tidak mesti dalam bentuk pemerintah meski ia suka memerintah dan yang lebih rendah adalah mereka yang menerima atau mentaati perintah.
- 7) C. Dilihat dari ukuran maka kekuasaan di dalam masyarakat ada yang besar dan ada yang kecil. Oleh karena itu, disebut makropolitik dan mikropolitik.
- 8) B. Dalam pandangan modern sosiologi politik membicarakan kekuasaan dalam masyarakat, dalam ukuran apa pun.
- 9) D. Sosiologi politik, dianggap sebagai cabang dari sosiologi sehingga sejajar dengan sosiologi ekonomi, sosiologi agama atau sosiologi hukum. Sedangkan sosiologi ilmiah mempunyai arti sosiologi yang dikaji secara ilmiah.
- 10) A. Rush dan Althoff adalah ilmuwan politik sehingga mereka memandang sosiologi sebagai bidang subjek atau semacam mata kuliah yang pembahasannya secara interdisipliner.

Tes Formatif 2

- 1) A. Dialektika Hegel dan juga Marx terdiri atas unsur-unsur tesa-antitesa-sintesa. Unsur-unsur ini tidak bisa dipertukarkan posisinya.
- 2) C. Menurut Marx, bentuk terakhir dari komunisme ialah masyarakat tanpa kelas (*classes community*).
- 3) B. Dengan bekerjanya para buruh di pabrik-pabrik dengan jam kerja yang begitu ketat menyebabkan mereka tidak atau kurang berhubungan dengan masyarakatnya sehingga menyebabkan mereka terasing dari masyarakatnya.
- 4) D. Perbedaan pemikiran Marx dan Weber adalah pada faktor penyebab stratifikasi. Jika Marx hanya disebabkan faktor tunggal, yakni ekonomi, sedangkan Weber multifaktor, yakni kelas status dan kekuasaan.
- 5) C. Tiga tipe legitimasi menurut Weber yang sangat terkenal adalah legitimasi tradisional, legitimasi kharismatik dan legitimasi legalitas.
- 6) B. Karya Walter-Bagehot yang memuat karakteristik sistem politik Inggris terdapat dalam “The English Constitutions”.
- 7) C. Dalam rangka memberikan pengaruh kepada masyarakat umum, sesuai dengan kehendak elite penguasa maka media komunikasi sangat besar pengaruhnya bagi elite kekuasaan untuk menyebarkan ide-ide.
- 8) A. Paling sesuai dengan pemikiran Pareto dan Mosca adalah pernyataan A meskipun pernyataan lain mengandung kebenaran.
- 9) C. Ada dua kesimpulan studi Ostrogorski dan Robert Michel, yakni bahwa partai politik tidak bisa menghindari dominasi oleh kelompok-kelompok kecil para aktivis dan kontrol umum oleh masyarakat hanya bersifat pura-pura.
- 10) D. Menurut pemikiran Weber faktor utama legitimasi kharismatik adalah karena faktor individu yang bersangkutan, bukan karena kekayaan yang dimiliki. Oleh karena itu, pernyataan tidak termasuk penyebab legitimasi kharismatik.

Tes Formatif 3

- 1) C. Catatan dari pelaku sejarah atau saksi mata merupakan sumber pertama dalam studi-studi historis.
- 2) B. Hal yang diperbandingkan dalam studi-studi komparatif adalah objek studinya. Dalam hal ini, data atau gejala dari suatu masyarakat atau bangsa dengan masyarakat atau bangsa lainnya.
- 3) A. Pendekatan institusional menitikberatkan pada lembaga-lembaga (institusi) yang sesuai dengan konstitusi negara (konstitusional) yang bersangkutan dan keabsahan lembaga tersebut (legalistik).
- 4) B. Pendekatan behavioral mengakibatkan kekakuan pada orang yang mengadakan analisis dalam suatu studi. Jadi, tidak benar kalau mengakibatkan keleluasaan.
- 5) A. Metode kuantitatif memiliki ciri utama penggunaan data-data kuantitatif dalam bentuk angka-angka dan penggunaan tes-tes statistika, seperti korelasi, uji-t, uji chi-kuadrat.
- 6) C. Pengamatan terlibat adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti sendiri yang secara langsung terlibat dalam proses-proses yang menjadi objek penelitian.
- 7) B. Teori-teori dan model sangat berperan memberikan garis-garis pedoman dalam melaksanakan penelitian dan analisis data.
- 8) C. Proposisi yang paling tepat dengan struktural fungsional adalah “semua tingkah laku dan gejala bisa memenuhi atau sebaliknya, gagal memenuhi sistemnya”.
- 9) D. Unsur-unsur utama analisis masukan-keluaran karya David Easton sebagai pengembangan dari pendekatan fungsionalisme adalah *input - proses - output*.
- 10) A. Dalam tahap pelaksanaan data yang paling dibutuhkan adalah mengenai perubahan sosial. Hal ini penting untuk melihat pengaruh program apakah perubahannya positif atau negatif.

Daftar Pustaka

- Bottommore, Tom. (1992). *Sosiologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiardjo, Miriam. (2003). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- Duverger, Maurice. (2005). *Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Giddens, Anthony. (1996). *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern, Suatu Analisis Karya-Karya Marx*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Koentjaraningrat. (2000). *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Rush, Michael dan Althoff, Phillip. (2005). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. (1990). *Sosiologi suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah, editor. (2005). *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Penerbit Prenada Media.